

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam memperkuat basis gerakannya, KRUHA menjalin interaksi dengan jaringan internasional yang mana ini diharapkan dapat membantu KRUHA untuk menyebarkan dan memperluas pemahaman permasalahan pengelolaan air Jakarta. dalam tahap *Information Politics* KRUHA menggunakan cara mempublikasi beberapa laporan yang dapat diunduh oleh publik pada laman resmi serta pada akun *official* sosial media dari KRUHA. Laporan-laporan mengenai privatisasi, remunisipalisasi, kondisi air di DKI Jakarta dapat diakses pada laman resmi KRUHA.

Ditahap *symbolic politics*, KRUHA membangun koalisi dengan jaringan global agar terbentuk adanya kesepahaman dan saling mengerti untuk bekerja sama sehingga jaringan ini bisa menguatkan satu sama lain. KRUHA menyadari bahwa agar permasalahan lokal menjadi isu transnasional, maka hal yang perlu dilakukan oleh KRUHA yaitu menjalin hubungan dengan para juru kampanye yang bekerja pada masalah yang sama atau serumpun di daerah lain. Dalam ranah domestik KRUHA melakukan diskusi dengan warga masyarakat yang berisikan tentang kondisi permasalahan air Jakarta, apa yang harus dilakukan masyarakat, dan tujuannya sendiri ialah untuk memperkuat pemahaman dan menciptakan tekanan yang lebih kuat dan masif.

Kemudian pada *lverage politics*, kekuatan dari KRUHA teramplifikasi oleh jaringan yang dibangunnya sehingga cukup untuk menekan serta membuka jalan negosiasi dengan aktor yang lebih kuat. Seperti yang dilakukan KRUHA dengan membuat laporan khusus kepada PBB terhadap kondisi hak atas air di indonesia. KRUHA juga mendorong diskursus alternatif melalui forum yang diadakan dengan gerakan-gerakan global. Mengingat badan internasional memiliki peran penting untuk memantau apakah negara-negara telah melaksanakan komitmen HAM, terutama dalam hak atas air. Sehingga ini sangat membantu KRUHA untuk dapat memperoleh dukungan yang lebih besar, dan diakui di kancah internasional.

Namun, proses pendifusian gagasan remunisipalisasi yang diadopsi dari gerakan global ternyata tidak mudah untuk dilakukan di Indonesia, hal ini melihat dari beberapa faktor yang menghambat terjadinya proses remunisipalisasi mulai dari kondisi infrastruktur, kenegaraan, pendanaan, kemudian kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat yang justru ikut mengeksklusi kelompok lain terhadap hak atas airnya.

Pada dasarnya remunisipalisasi merupakan reaksi kolektif dari privatisasi air yang tidak berkelanjutan. Permasalahan air ketika dikelola oleh swasta seperti kenaikan tarif, kurangnya investasi infrastruktur, serta bahaya lingkungan menjadi alasan yang tepat dan relevan untuk melakukan remunisipalisasi. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjelaskan bahwa air seharusnya dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Apa yang tertuang dalam konstitusi menjadi alasan yang kuat bagi pemerintah untuk tidak memberikan ruang kepada pihak swasta mengeruk keuntungan dengan tidak memperhatikan akses masyarakat terhadap air. Hal ini yang membuat gerakan-gerakan masyarakat banyak mendukung remunisipalisasi terhadap berbagai permasalahan air di Jakarta ini.

Dalam penelitian ini menghasilkan pandangan yang berbeda terkait dengan kemampuan Jakarta dalam melakukan remunisipalisasi. Pandangan pertama meyakini pemerintah mampu mengelola kembali airnya dengan alasan infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah merupakan modal yang menjanjikan. Pandangan lain menjelaskan dengan melihat hambatan-hambatan tersebut, hanya kemungkinan kecil remunisipalisasi dapat terjadi.

Meski begitu penguatan terhadap masyarakat harus tetap dilakukan, seperti yang dilakukan oleh KRUHA. Mendorong tekanan politik maupun memberikan masukan pada pemerintah harus gencar dilakukan, selain itu bagi KRUHA gagasan remunisipalisasi ini tidak mungkin berjalan sendirian, sehingga harus menysasar kepada persoalan dasarnya, yaitu soal privatisasi. Tentu kalau pun remunisipalisasi mau diajukan, maka harus disandingkan dengan deprivatisasi itu sendiri. Termasuk dengan merekognisi keterkaitan-keterkaitan dari karakteristik di daerah tersebut.

6.2 Saran

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas gerakan remunispalisasi dapat mengembangkan beberapa faktor lainnya yang tidak dibahas dari penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat melihat fenomena lainnya dari permasalahan gerakan remunispalisasi di Indonesia terkhusus Jakarta. Seperti melihat lebih jauh kondisi Jakarta dengan berbagai cara pasokan air yang dimiliki oleh Jakarta. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan untuk meneliti daerah lain yang juga sama-sama memiliki permasalahan terhadap pengelolaan air akibat dari privatisasi air.